

## BAB IV

### ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERSAMA (*DEELNEMING*)

#### AKIBAT KEADAAN MABUK MENURUT FIQH JINAYAH

##### A. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Bersama (*Deelneming*) Akibat Keadaan Mabuk Menurut KUHP

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Apabila dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Perbuatan dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2003), 9.



Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinya dan mampu bertanggung jawab kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa.

Berkaitan dengan hukuman, dalam hukum positif di Indonesia, mengenai tindak pidana pembunuhan bersama (*deelneming*) seseorang diatur dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pada pasal 338 KUHP menyatakan bahwa: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan pasal 55 ayat 1 ke 1 menyatakan bahwa: “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” atau “sengaja direncanakan”.

Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara spontan, dan sengaja direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta melaksanakannya dalam keadaan tenang pula. Adapun unsur-unsur



dipertanggung jawabkan berdasarkan bertumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya pikir seorang pelaku. Istilah tidak dapat dipertanggung jawabkan tidak dapat disamakan dengan “tidak ada kesalahan berupa disengaja atau *culpa*”. Namun yang dimaksud disini adalah berhubungan dengan keadaan daya berpikir tersebut dari si pelaku, ia tidak dapat dicela sedemikian rupa sehingga pantaslah ia dikenahi hukuman. Dalam hal ini diperlukan seorang dokter spesialis dan seorang psikiater.

Akan tetapi kenyataannya adalah bahwa seorang yang gila melakukan perbuatan yang sangat mengerikan sehingga dia pantas mendapat hukuman, lebih-lebih apabila pelaku kejahatan pura-pura menjadi gila. Sedangkan orang mabuk dapat dilepaskan dari hukuman, dilihat dari kadar mabuknya dan keadaannya. Pasal 44 ayat 2 KUHP, apabila hakim memutuskan bahwa pelaku berdasarkan keadaan daya berpikir tersebut tidak dikenakan hukuman, maka hakim dapat menentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama tenggang waktu percobaan, yang tidak melebihi satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.

#### **B. Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Bersama (*Deelneming*) Karena Mabuk Menurut Fiqh Jinayah**

Pertanggungjawaban dalam hukum Islam dalam segi pertanggungjawaban pidana, hubungan hukum dan pertanggungjawaban pidana, ditentukan oleh ketentuan hukuman dan ini merupakan salah satu prinsip dalam menentukan





Hukum Islam ditegaskan pada siapa saja tanpa pandang bulu, sekalipun seorang pejabat, politikus, pengusaha, aparat penegak hukum, dan sebagainya. Dalam Islam, rasa taqwa kepada Allah melahirkan penegak hukum yang jujur dan adil. Allah SWT berfirman:

أَوْعِيَّاكُمْ إِنِّ وَالْأَقْرَبِينَ الْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْلِيَّ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوْمِينَ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تَعْرِضُوا أَوْ تَلُودُوا وَإِنْ تَعْدِلُوا أَنْ أَهْوَىٰ تَتَّبِعُوا أَفَلَا يَهْمَا أُولَىٰ فَاللَّهُ فَقِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An- Nisa': 135).<sup>10</sup>

Menurut Bismar Siregar, prinsip hukum Islam tersebut tidak dikenal dalam system hukum sekuler (barat).<sup>11</sup> Peradilan hukum Islam yang berlaku secara adil dan memuaskan para pihak. Suatu saat diajukan seorang pencuri wanita kepada Rasulullah untuk diadili dan dijatuhi hukuman had potong tangan. Usmah Ibn Zaid memohon keringanan hukuman kepada Rasulullah, namun sikapnya ini ditanggapi Rasul seraya bersabda, "apakah kamu mengajukan keringanan terhadap salah satu hukuman dari Allah? Demi Allah kalau saja Fatimah Binti Muhammad mencuri, Ku potong tanganya". (HR. Bukhari dan Muslim). Khalifah Usman Bin Affan memerintahkan eksekusi hukuman *qisās*

<sup>10</sup>Tim penerjemah Al Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Depag RI, 1984), 131.

<sup>11</sup> Bismar Siregar, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 81.

terhadap Ubaidillah bin Umar (anak kandung mantan Khalifah Umar bin khattab) karena terbukti membunuh. Hanya saja eksekusi gagal dilaksanakan karena pihak korban telah memaafkannya, sebagai gantinya ia dikenakan membayar *diyāt* (denda). Juga perkara khalifah (kepala Negara khilafah Islam) Ali bin Abi Thalib yang pernah berselisih dengan seorang yahudi soal baju besi. Dalam proses persidangan khalifah Ali r.a tidak bisa meyakinkan hakim karena saksi yang diajukan Ali adalah anak dan pembantunya. Akhirnya hakim memutuskan yahudi tidak bersalah.

Islam sebagai agama dan ideologi, dilaksanakan secara utuh dengan tiga asas penerapan hukum Islam, pertama ketaqwaan individu yang mendorongnya untuk terikat kepada syari'at Islam, kedua, pengawasan masyarakat dan ketiga Negara Islam menerapkan syari'at secara utuh. Apabila salah satu asas ini telah runtuh, maka penerapan syari'at Islam dan hukum-hukumnya akan mengalami penyimpangan, dan akibatnya Islam sebagai agama dan ideologi akan hilang dari bumi Allah ini.

Dalam hukum Islam dikenal dengan nama *jarimah*. *Jarimah* (tindak pidana) dalam Islam yaitu larangan-larangan dalam syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* (hukuman yang ada nasnya) dan hukuman *ta'zir* (hukuman yang tidak ada nasnya). Jarimah dapat dibagi menjadi tiga macam:

1. *Jarimah hudud*
2. *Jarimah Qisās diyāt*









- a. Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan tanpa sengaja, karena membunuh dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain.
- b. Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan dengan sengaja, karena meskipun membunuh dalam keadaan mabuk namun sebelumnya dia telah merencanakan pembunuhan terhadap korban (semisal telah mempersiapkan alat yang dapat dipakai untuk membunuh orang lain) sehingga meskipun kondisi akal pikirannya tidak sadar membunuh orang lain ketika dalam kondisi mabuk namun pelaku telah mempersiapkan diri dan memiliki niat untuk membunuh korban.
- c. Pembunuh yang mabuk tersebut melakukan pembunuhan dengan sengaja, karena meskipun membunuh dalam keadaan mabuk sehingga kondisi akal pikirannya tidak sadar jika dirinya membunuh orang lain namun dalam membunuh korban telah didahului oleh niat untuk membunuh korban yaitu agar pelaku memiliki keberanian untuk membunuh maka pelaku membuat dirinya agar mabuk berat dan kemudian melakukan pembunuhan terhadap korban.
- d. Pembunuh yang mabuk tidak benar-benar dalam kondisi mabuk, sehingga kondisi akal pikirannya masih sadar (meskipun tidak 100%) namun dirinya masih sadar jika dirinya membunuh orang lain dan pelaku melakukan pembunuhan dengan mabuk untuk menghindari hukuman.







bin Zuaib, Jabir, As-Syarib bin Suwaid, Abu Said Al Khudhri, Abdullah bin Amru, Jarir bin Abdillah, Ibnu Masud, Syarhabil bin Aus, dan Ghatif Ibn Harits.

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan jumlah pukulan. Juhur ulama sepakat bahwa peminum khamar yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Pendapat mereka didasarkan pada perkataan Sayyidina Ali ra. Bila seseorang minum khamar maka akan mabuk. Bila mabuk maka meracau, bila meracau maka tidak ingat dan hukumannya 80 kali cambuk. Dalam riwayat lain Ali ra. Berkata: Rasulullah SAW mencambuk peminum khamar 40 kali, Abu Bakar juga 40 kali, sedangkan Ustman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah.

Dengan demikian dapat digarisbawahi bahwa pelaku pembunuhan dalam kondisi mabuk yang benar-benar mabuk sehingga dirinya kehilangan akal pikirannya, dan apabila pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh korban pada waktu sebelum terjadinya pembunuhan, serta pembunuhan yang dilakukan murni akibat mabuk dan tidak ada kesengajaan untuk membunuh, maka tidak dapat diberi hukuman sebagaimana hukuman bagi orang yang telah membunuh orang lain. Dengan kata lain, pembunuh mabuk yang demikian tidak dapat dihukum sesuai dengan hukuman untuk orang yang membunuh akan tetapi hanya dikenakan hukuman orang mabuk.